

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi, baik di sektor publik maupun swasta (Kurniawan, 2014). *Fraud* adalah tindakan yang melanggar hukum atau tidak etis yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau instansi secara tidak sah, biasanya dengan memanipulasi informasi, menyelewengkan aset, atau melanggar hukum. *Fraud* dapat merusak reputasi, integritas, dan kepercayaan masyarakat organisasi (Marciano, et al., 2021 ; Febriani, et. al., 2019). Faktor-faktor yang sering menyebabkan *fraud* termasuk kegagalan sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau bahkan konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat (Marciano, et. al., 2021). Keuangan, pemerintahan, dan bisnis swasta adalah beberapa industri di mana fenomena ini dapat ditemukan. Siapa pun, dari manajemen puncak hingga staf tingkat rendah, dapat melakukannya.

Salah satu masalah paling penting dalam dunia akuntansi dan audit adalah *fraud*, yang dapat merugikan instansi, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Melalui pelaksanaan audit yang independen dan profesional, auditor memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Namun, ada beberapa komponen yang dapat memengaruhi seberapa baik auditor melakukan tugasnya. Sangat penting

di auditor untuk tetap tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain. Tidakindependensian dapat menyebabkan penilaian auditor menjadi bias dan dapat meningkatkan kemungkinan *fraud* (Dodge, 2018). Independensi



auditor dapat membantu mencegah *fraud* (Limbong et. al., 2023), oleh karena itu pertimbangan auditor sangat penting selama proses audit karena mencakup kemampuan auditor, seberapa baik arsitektur sistem informasi auditor, dan pentingnya elemen laporan keuangan. Semua auditor diharuskan untuk mempertahankan disposisi independen yang tetap tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal, sehingga berfungsi sebagai pencegah kegiatan *fraud*. Pernyataan ini didukung oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Achmad et. al., (2022), yang menunjukkan bahwa independensi auditor secara signifikan meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi perilaku *fraud*. Sebaliknya, perspektif ini kontras dengan kesimpulan yang ditarik oleh Saputra et. al., (2020), yang menyatakan bahwa independensi tidak mempengaruhi kemahiran auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Keputusan yang diambil auditor juga dipengaruhi oleh sikap jujur dan moral. Auditor yang jujur cenderung melaporkan *fraud* yang mereka temui, sementara auditor yang tidak jujur mungkin mengabaikannya karena kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain (Sweeney et. al., 2019). Studi (Rahmawati et. al., 2023) menemukan bahwa integritas memengaruhi kemampuan untuk mencegah *fraud*. Karena kejujuran mengacu pada integritas dan tanggung jawab auditor, memantau integritas auditor dapat mengurangi kemungkinan *fraud*. Auditor yang jujur telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan etika. Hasil audit yang sebenarnya ditunjukkan oleh alasan yang jujur dari auditor. Selain itu, hal ini konsisten dengan

uan Anggara et. al., (2020), yang menunjukkan bahwa integritas memberikan pengaruh negatif pada *fraud* akuntansi. Sebaliknya,



penyelidikan terpisah yang dilakukan oleh Eldayanti et. al., (2020) mengungkapkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

Untuk menjalankan audit yang efektif, profesionalisme mencakup pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab. Auditor profesional berkomitmen untuk memberikan laporan yang akurat dan dapat diandalkan. Mereka juga akan mematuhi protokol dan standar yang berlaku (Louwers et. al., 2020). Egoisme, etika yang mendorong orang untuk bertindak demi kepentingan pribadi mereka sendiri, dapat memperbaiki hubungan antara kejadian *fraud* dan nilai-nilai dasar auditor. Misalnya, auditor yang egois cenderung mengabaikan pelanggaran demi keuntungan pribadi atau mempertahankan hubungan baik dengan klien meskipun menyadari *fraud*. Studi (Wijaya, et. al., 2020) menemukan bahwa profesionalisme mengurangi *fraud*. Auditor internal yang berkualifikasi yang mahir terlibat dalam perencanaan strategis dan pelaksanaan audit memiliki kapasitas untuk mengurangi kegiatan *fraud*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Rahmawati, et. al., 2023), yang menemukan bahwa profesionalisme auditor internal berdampak pada pendeteksian *fraud*. Namun, penelitian lain (Wicaksana, et. al., 2024) menemukan bahwa profesionalisme auditor internal tidak berdampak pada kemampuan untuk mendeteksi *fraud*.

Fraud adalah fenomena terkenal dalam masyarakat, mewakili tantangan signifikan yang mungkin dihadapi oleh otoritas pemerintah mana . Banyak sumber informasi tersedia yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas *fraud* dalam instansi. Pada tahun 2011, Badan Periksha Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memulai langkah



strategis dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaganya melalui pengembangan *Fraud Control System* (FCS). Inisiatif ini diawali dengan *Kick Off Meeting* FCS yang dilaksanakan di Pusdiklat BPK pada tanggal 30 Mei 2011, dipimpin langsung oleh Bapak Cris Kuntadi, selaku Ketua Tim Penguatan Integritas dan Akuntabilitas BPK. Langkah ini muncul dari kesadaran bahwa potensi *fraud* tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga pemeriksa negara seperti BPK. Namun, dengan sistem yang baik, risiko *fraud* dapat dikelola, dikendalikan, dan dideteksi secara dini. Oleh karena itu, FCS dikembangkan sebagai sistem pengendalian internal berbasis risiko yang mampu memantau aktivitas organisasi dan mengidentifikasi gejala-gejala penyimpangan sebelum berkembang menjadi kasus *fraud*.

Acara tersebut dibuka oleh Inspektur Utama BPK, Mahendro Sumardjo yang menyampaikan dukungan penuh terhadap penerapan sistem ini. Ia menegaskan bahwa Pusdiklat menjadi pilot project penerapan FCS di lingkungan BPK sebelum nantinya diimplementasikan secara menyeluruh ke satuan kerja lainnya, termasuk Inspektorat dan unit-unit pemeriksaan lainnya. Proyek ini terlaksana melalui kerja sama antara BPK dan USAID, serta difasilitasi oleh Juhani Grossmann, Direktur dari MSI (*Management Systems International*), sebuah lembaga konsultan non-pemerintah yang berperan dalam penguatan tata kelola dan sistem antikorupsi. Melalui penerapan FCS ini, BPK menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya anti-fraud dan memastikan setiap proses audit dan pengelolaan di internal lembaga berlangsung secara transparan dan akuntabel. Program ini menjadi contoh nyata upaya pendeteksian dan pencegahan



fraud di lingkungan lembaga pemeriksa keuangan negara di Indonesia, serta menjadi model bagi instansi pemerintah lain untuk menerapkan sistem serupa.

Penelitian ini memilih menggunakan teori *fraud pentagon* karena teori ini dinilai lebih lengkap dan relevan dalam menjelaskan perilaku *fraud* dibandingkan dengan *fraud triangle*, *fraud diamond*, dan *fraud hexagon*. *fraud triangle* hanya menekankan tiga faktor dasar, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi, sehingga masih kurang menggambarkan kompleksitas perilaku individu dalam melakukan *fraud*. *Fraud diamond* menambahkan unsur kemampuan, namun masih terbatas pada aspek teknis pelaku. Sementara itu, *fraud hexagon* menambah faktor kolusi, tetapi lebih cocok untuk konteks *fraud* yang melibatkan banyak pihak. *Fraud pentagon* dianggap paling sesuai karena tidak hanya mencakup faktor ekonomi dan kesempatan, tetapi juga memasukkan arogansi, yang berkaitan langsung dengan sikap, nilai moral, dan karakter individu. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang menekankan peran nilai dasar auditor dan perilaku etis dalam pendeteksian *fraud*, sehingga *fraud pentagon* mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan mudah dipahami terhadap penyebab terjadinya *fraud*.

Fokus pada pencegahan dan deteksi *fraud* meningkat sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kasus *fraud* baik di tingkat nasional maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir. Auditor harus memiliki sifat ar seperti independensi, integritas, dan profesionalisme saat melakukan erjaannya (Wulandari, et. al., 2018 ; Rini, 2021 ; Rahmawati et al., 2023). litor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



(BPK-RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah contoh yang paling tepat untuk ini (Rini, 2021). Nilai-nilai ini sangat penting untuk mencegah dan menemukan *fraud* yang mungkin terjadi selama proses audit. Auditor yang independen berarti mereka tidak terpengaruh oleh pihak yang melakukan audit atau pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil audit. Integritas, di sisi lain, adalah komitmen auditor untuk bertindak secara konsisten dan objektif dalam melaksanakan tugasnya. Namun, profesionalisme berkaitan dengan keahlian dan kemampuan auditor untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan prinsip dan standar audit yang telah ditetapkan.

Faktor internal, seperti auditor egois, yang merupakan kecenderungan mereka untuk memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan umum, juga dapat memengaruhi etika auditor. Hal ini dapat menjadi tantangan untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme auditor. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam bagaimana independensi, integritas, dan profesionalisme auditor berdampak pada kemungkinan terjadinya *fraud* dengan menggunakan etika egoisme sebagai variabel moderasi. Studi ini sangat penting untuk mengidentifikasi efek negatif dari etika egoisme dalam lingkungan kerja auditor di BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas audit dan mencegah *fraud* (Mangesti, et. al., 2019).

Teori atribusi adalah teori yang dapat menjelaskan motif atau yebab dari perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa ada dua or yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu faktor eksternal faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kendali



seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan, situasi nasib, atau tekanan. Sebaliknya, faktor internal adalah faktor yang bergantung pada kemampuan atau kemampuan seseorang. (Wiastrini dan Dwirandra, 2018).

Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu, khususnya auditor, menilai atau menginterpretasikan penyebab suatu perilaku, khususnya yang berkaitan dengan *fraud*. Teori ini membahas bagaimana seseorang mengatribusi (menyematkan penyebab) suatu perilaku berdasarkan faktor internal (seperti karakteristik seseorang) atau eksternal (seperti tekanan lingkungan). Dalam penelitian ini, faktor internal yang diharapkan memengaruhi kemungkinan *fraud* adalah independensi, integritas, dan profesionalisme sebagai nilai dasar auditor (Ramadhaniyati, et. al., 2014 ; Panjaitan et. al., 2021 ; Wulandari, et. al., 2018).

Auditor dihadapkan pada situasi di mana penilaian moral dan profesional diperlukan; ini adalah situasi di mana keputusan untuk melakukan atau menghindari *fraud* dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti profesionalisme dan integritas. Teori atribusi memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana nilai-nilai personal auditor dan interaksi dengan etika egoisme mempengaruhi etika egoisme sebagai variabel moderasi, karena auditor yang cenderung egois mungkin mengajukan perilaku *fraud* sebagai hal yang dapat diterima jika itu sesuai dengan kepentingan pribadi mereka.



Dari analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa atribut independensi, integritas, dan profesionalisme secara signifikan berkontribusi pada pendeteksian kegiatan *fraud*. Penelitian ini mengacu pada studi yang

dilakukan oleh Sastrawan (2022), yang meneliti Dampak Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Tekanan Keuangan terhadap *fraud*, dengan Egoisme berfungsi sebagai Faktor Etika Moderasi (Studi Kasus di Departemen Pertanian Kabupaten Luwu Utara). Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Sastrawan (2022) terletak pada lokasi, objek dan variabel independen. Lokasi dalam penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara dengan objek penelitian pegawai Inspektorat dan pegawai bagian keuangan di SKPD Kabupaten Luwu Utara, sedangkan lokasi dalam penelitian ini dilakukan di BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan objek penelitian auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Variabel pengendalian internal, budaya organisasi dan tekanan finansial pada penelitian sebelumnya diganti menjadi independensi, integritas dan profesionalisme yang merupakan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh seluruh pegawai BPK RI.

Faktor independensi berkaitan dengan elemen kesempatan dalam *Pentagon Fraud*. Auditor yang memiliki independensi yang baik tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak eksternal atau internal yang dapat mendorong *fraud*, sehingga kemungkinan mereka melakukan *fraud* akan berkurang (Wulandari, et. al., 2018). Kedua, integritas dan profesionalisme terkait dengan elemen rasionalisasi. Auditor dengan integritas dan profesionalisme tinggi cenderung memiliki sistem moral yang kuat, yang membuat mereka lebih sulit untuk merasionalisasi tindakan *fraud*. Dalam konteks ini, etika egoisme sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi rasionalisasi. Meskipun bertentangan dengan integritas dan profesionalisme, auditor yang egois mungkin lebih mudah merasionalisasi



tindakan *fraud* jika itu menguntungkan mereka secara pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menemukan bagaimana nilai-nilai dasar auditor berkontribusi pada pengurangan *fraud* dan bagaimana etika egoisme dapat memoderasi atau melemahkan pengaruh nilai-nilai tersebut terhadap kecenderungan melakukan *fraud*.

Dibandingkan dengan variabel pengendalian internal, budaya organisasi, dan tekanan finansial yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, alasan untuk memilih variabel independensi, integritas, dan profesionalisme sebagai nilai utama auditor dalam penelitian ini adalah karena peran auditor dalam mencegah *fraud*. Auditor bertanggung jawab untuk menjaga kualitas dan kepercayaan laporan keuangan; kinerja mereka didukung oleh tiga prinsip utama: independensi, integritas, dan profesionalisme. Ketiga faktor ini lebih penting untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bertanggung jawab untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, pengendalian budaya dan pengendalian internal organisasi lebih sering dikaitkan dengan mekanisme internal. Sementara itu, faktor eksternal yang lebih relevan dalam hal manajemen atau organisasi secara keseluruhan adalah tekanan keuangan. Dengan memilih variabel independensi, integritas, dan profesionalisme, penelitian ini dapat mempelajari lebih lanjut bagaimana karakteristik dasar auditor mempengaruhi risiko *fraud*, terkait dengan etika profesional auditor. Etika egoisme sebagai moderator tetap relevan dalam penelitian ini karena dapat menunjukkan bagaimana kecenderungan menguntungkan pribadi auditor memengaruhi hubungan antara nilai-nilai dasar tersebut dengan perilaku *fraud*. Oleh karena itu, variabel ini lebih sesuai



dengan konteks BPK-RI, yang memerlukan standar profesionalisme dan etika yang tinggi untuk mendeteksi *fraud*.

Pilihan lokasi penelitian di BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan lokasi penelitian sebelumnya di Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara didasarkan pada alasan strategis dan relevansi konteks yang lebih kuat. Pertama, BPK-RI adalah lembaga negara yang bertanggung jawab langsung untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Karena itu, subjek yang sangat relevan dalam penelitian tentang *fraud* adalah auditor BPK-RI, yang bertanggung jawab untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas keuangan publik.

Penelitian yang dilakukan di BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar auditor seperti independensi, integritas, dan profesionalisme diterapkan dalam praktik audit sektor publik. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada budaya dan pengendalian internal organisasi di pemerintahan daerah, yang mungkin tidak memiliki pengawasan dan prosedur ketat dari BPK. Selain itu, lokasi penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran yang lebih baik tentang Pemilihan BPK-RI Maluku Utara sebagai subjek penelitian memberikan alasan yang lebih baik untuk menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip etis auditor di institusi pengawas negara dapat mempengaruhi kemungkinan *fraud*.



Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Independensi, Integritas

dan Profesionalisme terhadap Pendeteksian *Fraud* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
4. Apakah etika egoisme memoderasi pengaruh independensi terhadap pendeteksian *fraud*?
5. Apakah etika egoisme memoderasi pengaruh integritas terhadap pendeteksian *fraud*?
6. Apakah etika egoisme memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap pendeteksian *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh independensi terhadap pendeteksian *fraud*.
2. Pengaruh integritas terhadap pendeteksian *fraud*.
3. Pengaruh profesionalisme terhadap pendeteksian *fraud*.

Pengaruh independensi terhadap pendeteksian *fraud* dimoderasi etika egoisme.



5. Pengaruh integritas terhadap pendeteksian *fraud* dimoderasi etika egoisme.
6. Pengaruh profesionalisme terhadap pendeteksian *fraud* dimoderasi etika egoisme.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai dasar auditor, seperti independensi, integritas, dan profesionalisme, berfungsi untuk mendeteksi *fraud*, khususnya dalam hal pemeriksaan keuangan di lembaga pemerintah. Penelitian ini, dengan menggunakan etika egois sebagai variabel pemoderasi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kecenderungan individu untuk bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dapat berdampak pada hubungan antara nilai-nilai dasar auditor dan tindakan *fraud*. Penelitian ini dapat menambah literatur tentang perilaku etis dalam auditing dan memberikan dasar untuk membuat kebijakan yang meningkatkan pengawasan keuangan di lembaga pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini, pengaruh nilai dasar auditor seperti independensi, integritas, dan profesionalisme terhadap pendeteksian *fraud* dengan egoisme sebagai faktor moderasi. Studi ini terkait dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara karena bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan pengendalian internal untuk menghentikan dan menemukan *fraud*. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas audit dengan



memperkuat nilai-nilai dasar auditor dan penegakan etika, sehingga dapat mengurangi kemungkinan *fraud* dalam proses audit di organisasi pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memfasilitasi pemahaman yang komprehensif tentang wacana, sangat penting untuk menyajikan kerangka sistematis yang berfungsi sebagai dasar dan pedoman untuk menyusun tesis. Pendekatan sistematis untuk menulis digambarkan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Bagian ini menjelaskan kerangka kontekstual, penggambaran masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan struktur metodologis dokumen.

BAB II Tinjauan Literatur. Bagian ini menggambarkan kerangka teoritis yang mendasari upaya penelitian. Pada bagian ini, para sarjana meneliti berbagai sumber yang berkaitan dengan materi pelajaran, yang akan digunakan sebagai referensi dalam merumuskan hipotesis. Selain itu, bagian ini mencakup evaluasi empiris, secara khusus menyoroti temuan dari penyelidikan anteseden.

BAB III Kerangka Teoritis dan Hipotesis. Bagian ini menjelaskan kerangka konseptual yang memandu penelitian dan kemunduran hipotesis yang diusulkan. Selain itu, pasal ini menggambarkan konstruksi hipotesis yang berasal dari prinsip penurunan logis.

BAB IV Metode Penelitian. Menjelaskan kerangka penelitian, pengaturan dan durasi penelitian, populasi target, karakteristik sampel, metodologi pengambilan sampel, jenis dan asal data, variabel penelitian bersama dengan definisi operasionalnya, alat penelitian,



teknik analitis untuk interpretasi data, dan gambarkan metode pemrosesan data yang digunakan menjelang prosedur analitik yang digunakan.

BAB V Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan dan menguraikan hasil analisis pengolahan data dan pembahasan terkait rumusan masalah dan pembahasan.

BAB VI Penutup. Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian beserta implikasi penelitian yang terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi manajerial dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

1. Teori Atribusi

Teori atribusi berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami mekanisme di mana individu membedakan penyebab dan motivasi yang mendasari tindakan mereka. Konstruksi teoretis ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh dua kategori faktor utama: eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup pengaruh yang berada di luar yurisdiksi individu, seperti tantangan pekerjaan, keadaan emosional, dan keadaan tekanan tinggi. Sebaliknya, faktor internal berkaitan dengan atribut yang berasal dari kemampuan atau kompetensi bawaan individu (Wiastrini, et. al., 2018).

Teori atribusi adalah dasar yang dapat digunakan untuk mempelajari apa yang dapat mempengaruhi kinerja auditor (Dewi, et. al., 2017). Dalam hal ini, metode ini dapat membantu memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada perilaku yang terkait dengan sikap dan karakteristik individu. Seperti yang kita ketahui, peran auditor dalam menyampaikan hasil laporannya sangat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, peneliti menduga bahwa fitur auditor internal dan eksternal memengaruhi pendeteksian *fraud*. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk mengubah perilaku individu untuk mengetahui bagaimana perilaku pemeriksa mencegah *fraud*.



2. *Pentagon Fraud*

Pentagon Fraud adalah sebuah teori deteksi *fraud* yang dikembangkan dari model sebelumnya (*fraud triangle* dan *fraud diamond*) dengan menambahkan elemen arogansi di samping empat elemen lainnya: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kompetensi (*competence*). Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* terjadi bukan hanya karena adanya tekanan, peluang, dan cara berpikir pelaku untuk membenarkan tindakannya, tetapi juga karena pelaku memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi kelemahan sistem dan keyakinan berlebihan (arogansi) bahwa mereka bisa lolos dari pengawasan internal. Dengan lima elemen tersebut, *fraud pentagon* memberikan kerangka yang lebih lengkap untuk memahami dan mengidentifikasi risiko *fraud* dalam organisasi, di mana kombinasi elemen-elemen ini dapat memicu perilaku curang termasuk manipulasi laporan keuangan atau aktivitas *fraud* lainnya. Teori ini telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk mendeteksi *fraud* pada perusahaan dan laporan keuangan di Indonesia, menunjukkan relevansi dan aplikasinya dalam konteks akademik dan praktik audit saat ini.

3. Independensi

Sebagaimana diartikulasikan oleh Arens (2008), otonomi ruang lingkup audit merupakan sudut pandang yang tidak bias mengenai setiap individu yang terlibat dalam proses pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan merumuskan dokumentasi audit. Auditor independen sangat penting untuk menyediakan layanan audit berkualitas tinggi (Amilin dan Utami, 2008 dalam Suharti, 2013). Menurut mereka,



melaksanakan sikap independen seorang auditor melibatkan perencanaan tindakan yang akan dilakukan selama proses audit.

4. Integritas

Sebagian besar orang menganggap integritas sebagai gabungan dari pikiran, kata-kata, dan tindakan untuk menciptakan gengsi dan kepercayaan. Integritas berarti tetap utuh dan lengkap (Ippho Santoso). Sementara integritas pada dasarnya menolak gagasan *fraud*, ia mampu mengakomodasi kesalahan yang tidak disengaja dan ketidaksepakatan yang tulus. Integritas berfungsi sebagai karakteristik yang memperkuat kepercayaan individu satu sama lain dan menetapkan tolok ukur yang harus dievaluasi auditor dalam setiap penilaian yang mereka lakukan (Sunarto, 2003). Berbicara tentang integritas tidak terlepas dari upaya untuk menjadi manusia seutuhnya, beramal, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan rencananya (Henry Cloud).

5. Profesionalisme

Sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), profesionalisme mengacu pada atribut atau karakteristik yang menunjukkan seseorang yang terlibat dalam pekerjaan profesional. Profesionalisme adalah keinginan untuk bertanggung jawab dan mempertahankan kualitas suatu pekerjaan dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Profesionalisme berarti bertanggung jawab untuk berperilaku dengan cara yang lebih dari hanya memenuhi tugas (Agus Salim, 2020). Profesionalisme auditor berarti mempertahankan status profesi dan mempertahankan citra publik terhadapnya, bertanggung



jawab terhadap ketentuan hukum dan terhadap diri sendiri (Halim dan Hariani, 2020).

Profesionalisme adalah variabel yang telah didefinisikan dalam berbagai konteks dan dari berbagai sumber, menurut Doukas (2003) dan Phaibon (2012). Selain itu, dalam pelayanan etika atau moral lainnya, ada fenomena utama tugas yang terkait dengan kultur teknis. Keterampilan, keterlibatan, tanggung jawab, komitmen, kompetensi, dan karakter pekerjaan yang tinggi disebut profesionalisme. Meskipun demikian, Arens (2018:87) menyatakan bahwa profesionalisme mencakup hal-hal lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab dan mematuhi undang-undang masyarakat. Harahap (2020) menyatakan bahwa jika auditor memenuhi dan mematuhi kode etik IAPI, yang terdiri dari: a) Prinsip-prinsip IAPI, yang merupakan standar ideal untuk perilaku etis; b) Peraturan perilaku, seperti standar minimum perilaku etis yang harus diikuti; dan c) Interpretasi peraturan perilaku tidak diperlukan.

6. Pendeteksian *Fraud*

Pendeteksian *fraud* (*fraud detection*) merupakan salah satu bidang penting dalam akuntansi forensik, auditing, dan sistem informasi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi fraud secara dini sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Menurut West and Bhattacharya (2016), *fraud detection* didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengenali aktivitas mencurigakan melalui analisis laporan keuangan, transaksi, maupun perilaku organisasi. Dalam praktiknya, metode deteksi *fraud* terbagi ke dalam dua pendekatan besar: berbasis auditor/manusia dan berbasis teknologi/algorithm. Pendekatan auditor meliputi



penggunaan model teoretis seperti *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, *Fraud pentagon* dan *Fraud Hexagon* sebagai dasar untuk menilai tekanan, kesempatan, rasionalisasi, serta faktor lain yang memicu *fraud* (Dorminey et al., 2012). Sementara itu, pendekatan teknologi banyak memanfaatkan data mining, *machine learning*, hingga *artificial intelligence* untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar (West & Bhattacharya, 2016; Phua et al., 2010).

Pendeteksian *fraud* oleh auditor merupakan salah satu tanggung jawab utama dalam proses audit, meskipun standar audit internasional menekankan bahwa auditor tidak menjamin laporan keuangan sepenuhnya bebas dari *fraud*. Menurut International Standard on Auditing (ISA) 240, auditor wajib merancang prosedur audit yang dapat memberikan keyakinan memadai untuk mengidentifikasi risiko material akibat *fraud*. Dalam praktik akademik, penelitian menunjukkan bahwa auditor cenderung menggunakan kerangka teoretis seperti *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, *Fraud Pentagon* dan *Fraud Hexagon* untuk menilai tekanan, kesempatan, rasionalisasi, serta faktor lain yang relevan (Dorminey et al., 2012). Auditor mendeteksi *fraud* melalui analisis laporan keuangan (misalnya dengan menggunakan model Beneish M-Score atau analisis rasio), pengujian pengendalian internal, serta wawancara dengan manajemen dan karyawan untuk menilai integritas serta potensi kolusi (Amiram et al., 2018). Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengalaman dan skeptisisme profesional auditor sangat berperan dalam efektivitas deteksi *fraud*; auditor dengan tingkat skeptisisme tinggi cenderung lebih kritis terhadap anomali dalam laporan keuangan (Hurt



et al., 2013). Namun, literatur juga menekankan keterbatasan: auditor sering menghadapi asimetri informasi, keterampilan manajemen dalam menyembunyikan *fraud*, serta tekanan klien yang dapat mengurangi objektivitas (Trompeter et al., 2013). Dengan demikian, pendeteksian *fraud* oleh auditor bergantung pada kombinasi kerangka teori *fraud*, keterampilan analitis, sikap skeptis profesional, serta dukungan teknologi audit modern.

7. Etika Egoisme

Egoisme etika mengacu pada tingkah laku yang berfokus pada kepentingan pribadi (Ahmad, 2011). Dalam proses pengambilan keputusan, organisasi atau perusahaan yang menganut budaya etika egois lebih cenderung mempertimbangkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Dalam iklim organisasi yang melayani diri sendiri secara etis, perusahaan memaksa tenaga kerja mereka untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi organisasi, terlepas dari konsekuensinya. Evaluasi kinerja karyawan dianggap menguntungkan semata-mata jika memberikan manfaat bagi perusahaan. Selain memfasilitasi organisasi dalam proses pengambilan keputusan, karyawan juga memperhatikan keuntungan pribadi mereka sendiri. Auditor internal individu dihadapkan pada tugas menentukan kebenaran atau kesalahan keputusan (Floyd, 2010).



2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1

Tabel Empiris

No	Judul Penelitian	Populasi dan Sampel	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pengendalian, Budaya Organisasi dan Tekanan Finansial terhadap <i>Fraud</i> dengan Etika Egosime sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara), Randi Sastrawan (2022)	25 SKPD Kabupaten Luwu Utara, 142 Responden	Variabel X : Pengendalian, Budaya Organisasi Tekanan Finansial Variabel Y : <i>Fraud</i> Variabel Z : Etika Egosime	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> • Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> • Tekanan finansial berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i>. • Efek moderasi etika egoisme memperlemah pengaruh pengendalian internal • Efek moderasi etika egoisme memperlemah pengaruh budaya organisasi terhadap <i>fraud</i> • Efek moderasi etika egoisme memperkuat



No	Judul Penelitian	Populasi dan Sampel	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				pengaruh tekanan finansial terhadap <i>fraud</i> .
2	Pengaruh Profesionalisme dan Independensi terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Iklim Etika-Egoisme sebagai Variabel Moderasi, Christine Lie Wijaya dan David Adechandra A. P (2020)	Karyawan di PT. X bidang farmasi dengan sampel 60 orang	Variabel X : Profesionalisme dan Independensi Variabel Y : Pencegahan Kecurangan Variabel Z : Etika-Egoisme	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, • Independensi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. • Iklim etika-egoisme sebagai variabel moderasi ini memperkuat hubungan antara profesionalisme dan independensi dengan pencegahan kecurangan.
3	Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa dan Integritas Aparatur terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi	Populasinya adalah pegawai di kecamatan Blahbatuh, dengan sampel sebanyak 72 orang.	Variabel X : Budaya Organisasi, Kompetensi dan Integritas	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> yang terjadi dalam



No	Judul Penelitian	Populasi dan Sampel	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Dana Desa (Sudi Empiris di Desa Se-Kacamatan Blahbatuh), I Gusti Ayu Agung Trisna Widyani dan Ni Wayan Alit Erlina Wati (2020)		Variabel Y : Pencegahan Kecurangan	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa • Integritas Aparatur memiliki pengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4	Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme dan Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) sebagai Variabel Moderasi, Didi Atmaja (2016)	Populasinya adalah auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 157 responden.	<p>Variabel X : Kompetensi, Profesionalisme dan Pengalaman Audit</p> <p>Variabel Y : Kemampuan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Mendeteksi <i>Fraud</i></p> <p>Variabel Z : Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) sebagai Variabel Moderasi



No	Judul Penelitian	Populasi dan Sampel	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>terkait dengan Teori Atribusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>. • Profesionalisme berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>. • Pengalaman Audit berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>. • TABK berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>. • TABK tidak memperkuat pengaruh Kompetensi terhadap



No	Judul Penelitian	Populasi dan Sampel	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TABK tidak memperkuat pengaruh Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>. • TABK pengaruh Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>.
6	<p>Pengaruh Penerapan Gcg, Kesadaran Anti-<i>Fraud</i>, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>), Harry Budiantoro, Nanda Dwi Aprillivia, Kanaya Lapae (2022)</p>	<p>Dalam penelitian ini, responden bertanggung jawab atas customer support dan financial services atau melakukan kontak langsung dengan klien dan di bidang informasi nasabah dan situasi keuangan secara langsung di Bank BTN. Berdasarkan metode sampling jenuh, jumlah responden dalam survei ini adalah 50.</p>	<p>Variabel X : Penerapan Gcg, Kesadaran Anti-<i>Fraud</i>, Dan Integritas Karyawan</p> <p>Variabel Y : Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	<p>FHIPenerapan Good Corporate Governance (GCG) dan kesadaran anti <i>fraud</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>. Serta integritas karyawan tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>.</p>



No	Judul Penelitian	Populasi dan Sampel	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	“Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Auditor Internal, dan Integritas Auditor terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Falih Zaki Sudharma (2023)	Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik <i>sensus sampling</i> , karena semua anggota populasi digunakan sebagai responden penelitian. Jadi responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan jumlah auditor sebanyak 46 orang.	Variabel X : Budaya Organisasi, Peran Auditor Internal, dan Integritas Auditor Variabel Y : Pencegahan <i>Fraud</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Peran auditor internal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Integritas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>.

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2025

